

# Emas dan Tanah: Kasus Penguasaan Sumber-sumber Ekonomi di Sumatera dan Jawa Pada Abad VII-X Masehi (Kajian Prasasti-prasasti Masa Sriwijaya dan Mataram Kuna)

Nurhadi Rangkuti

**Keywords:** inscription, Sriwijaya, Ancient Mataram, economy-politic

## How to Cite:

Rangkuti, N. Emas dan Tanah: Kasus Penguasaan Sumber-sumber Ekonomi di Sumatera dan Jawa Pada Abad VII-X Masehi (Kajian Prasasti-prasasti Masa Sriwijaya dan Mataram Kuna). *Berkala Arkeologi*, 14(2), 163-169. <https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.716>



## Berkala Arkeologi

<https://berkalarkeologi.kemdikbud.go.id/>

Volume 14 No. 2, 1994, 163-169

DOI: [10.30883/jba.v14i2.716](https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.716)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

**EMAS DAN TANAH:  
Kasus penguasaan sumber-sumber ekonomi  
di Sumatera dan Jawa pada abad VII - X Masehi  
(Kajian prasasti-prasasti masa Sriwijaya dan Mataram Kuna)**

**Nurhadi Rangkuti  
(Pusat Penelitian Arkeologi Nasional)**

Prasasti merupakan sumber sejarah masa lalu yang tertulis di atas batu atau logam. Sebagian besar prasasti tersebut diterbitkan atas perintah raja atau penguasa, pada umumnya berisi angka tahun, daftar pejabat tinggi kerajaan, pendirian bangunan suci, penetapan daerah perdikan (*sima*), agama, kutukan, keputusan pengadilan, organisasi sosial dan organisasi keagamaan. Sebagai media penguasa, prasasti digunakan untuk mengumandangkan peraturan-peraturan, wewenang dan keputusan penguasa yang berkaitan dengan kepentingan politik-ekonomi penguasa pada masa itu.

Di Indonesia, sebagian besar dari prasasti-prasasti tersebut dikeluarkan oleh raja-raja yang memerintah di berbagai kepulauan sejak abad ke-5 (Boechari, 1977:2). Pada masa-masa itu telah muncul peradaban-peradaban besar dalam bentuk kerajaan. Kelangsungan keberadaan kerajaan-kerajaan besar itu tergantung pada kekuatan jaringan ekonomi dan pengaturannya, selain aspek-aspek lainnya. Sriwijaya sebuah kerajaan besar di Sumatera yang berdiri sejak abad VII M, dapat mempertahankan hegemoninya karena menguasai jaringan perdagangan dan sumber-sumber alam. Kerajaan Mataram Kuna di Jawa Tengah berkembang menjadi besar pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, karena didukung oleh kekuatan ekonomi pertaniannya. Majapahit kerajaan yang menguasai seluruh wilayah nusantara, dapat mempertahankan kejayaannya lebih dari dua abad karena menguasai perdagangan dan mempertahankan surplus pertanian.

Strategi politik ekonomi, kiranya mutlak menjadi landasan yang kokoh bagi suatu kerajaan agar dapat mempertahankan keberadaan dan mengembangkan wilayahnya dalam konteks geopolitik dan ekonomi. Dengan menguasai dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang potensial dan handal, kelangsungan roda pemerintahan seorang raja dan negara dapat dipertahankan.

Pokok bahasan dalam tulisan ini adalah, sejauh mana prasasti sebagai media penguasa menyiratkan dan menyiratkan kebijakan penguasa dalam kepentingan politik-ekonomi pada masa itu? Apakah terdapat perbedaan yang transparan dalam strategi penguasaan dan pengaturan sumber-sumber ekonomi, dari dua peradaban yang memiliki sumber-sumber ekonomi yang berbeda?

Dalam kesempatan ini dibahas strategi penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Mataram Kuna di Jawa. Kedua kerajaan besar di nusantara tersebut memiliki proses pertumbuhan peradaban yang berbeda dilihat dari sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Secara umum diketahui Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan kerajaan maritim yang menguasai ekonomi perdagangan dan sumber-sumber alam, sedangkan Kerajaan Mataram Kuna merupakan kerajaan agraris yang bersandar pada ekonomi pertanian.

Sebagai bahan kajian digunakan data-data prasasti peninggalan dari kedua kerajaan tersebut. Untuk mengetahui kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh seorang penguasa, maka dalam tulisan ini dibahas prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh Dapunta Hiyam Sri Jayanasa, mewakili kerajaan Sriwijaya, dan prasasti-prasasti pada masa pemerintahan raja Kayuwangi dan Watukura Dyah Balitung, raja Mataram Kuna. Dapunta Hiyam Sri Jayanasa, merupakan raja Sriwijaya pada abad VII Masehi yang banyak meninggalkan prasasti, yaitu 13 buah. Seluruh prasasti dipahatkan di atas batu, beraksara Pallava, berbahasa Melayu Kuna dan Sansekerta (Kartakusuma, 1993:17). Rakai Watukura Dyah Balitung dikenal sebagai salah satu raja pada periode Mataram Kuna yang termasuk banyak mengeluarkan prasasti setelah Rakai Kayuwangi pu Lokapala (778-804 C). Sampai saat ini telah ditemukan 38 buah prasasti dari masa pemerintahan Dyah Balitung (820-832 C) yang memerintah selama 12 tahun (Titi Surti Nastiti dkk, 1982:3).

Disesuaikan dengan pokok bahasan, maka data prasasti yang digunakan adalah prasasti yang memuat informasi tentang sumber-sumber ekonomi dengan segala aspeknya. Untuk itu dipilih beberapa variabel yang relevan dengan pokok bahasan, yaitu sumber alam, sumber ekonomi, sarana dan prasarana yang mendukung, serta tata cara pengelolaannya yang berkaitan dengan birokrasi dan organisasi sosial. Kajian ini didukung pula oleh data lainnya, baik berita asing, data arkeologi, data etnohistori dan data etnografi.

## Emas dan peradaban di Sumatera

Sejak awal tarikh Masehi, Pulau Sumatera telah dikenal di dunia internasional sebagai penghasil emas dan perak. Catatan tertua mengenai perdagangan emas di Asia Tenggara adalah kedatangan para pedagang India untuk mencari komoditi emas. Para pedagang India mulai mengalihkan perhatiannya ke daerah timur, khususnya Asia Tenggara, ketika pada awal tarikh Masehi, India kehilangan sumber emas yang utama, yaitu di Siberia. Kafilah-kafilah Siberia datang membawa emas ke India melalui Baktria. Tetapi gerakan-gerakan berbagai bangsa penduduk Asia Tengah telah memutuskan jalan-jalan kafilah dari utara itu. Kemudian India mengimpor mata uang emas dari Kerajaan Romawi, tetapi dihentikan atas perintah Kaisar Vespasianus (69-79 M) karena mengalirnya mata uang emas dalam jumlah besar ke luar negeri ternyata membahayakan ekonomi negara (Sumadio, 1984:11).

Daerah timur India dikenal dengan nama-nama yang mengandung arti emas dan perak. Nama-nama *Suvarnabhumi*, *Suvarnadwipa*, *Chryse*, *Argyre Chora*, *Chryse Chora*, *Chryse Chersonesos*, merupakan nama-nama tempat yang berarti emas dan perak. Bahkan *Suvarnadwipa* memang digunakan untuk menyebut Sumatera, yang berarti pulau emas.

Pulau Sumatera sebagai penghasil emas telah tercatat dalam sejarah. Claudius Ptolemaeus, seorang astronom dan geograf Eropa, pada abad pertama dan kedua Masehi, telah menulis *Geographike Hyphegesis*. Dalam kitab itu dibicarakan ia mengelilingi wilayah yang disebut "*Chryse Chersonesos*" (semenanjung emas) dan menjelajah daerah bangsa Leistai sampai ke Zabai kemudian menuju ke timur laut sampai Teluk Agung (Megas Kolpos), terus berlanjut ke muara Sungai Sutura (Seros Potamos), untuk selanjutnya menuju ke selatan dengan menyusur pantai timur ke Kattigara (Meulen, 1988:27). Paul Wheatley (1961) menyatakan yang dimaksud Semenanjung Emas adalah Semenanjung Malaka. Beberapa sarjana lain, seperti Wilhelm Volz (1911) dan WJ van der Meulen (1988) menyatakan Semenanjung Emas yang dimaksud adalah Sumatera, sedangkan Megas Kolpos adalah Teluk Siam, sehingga nama Zabai ditempatkan di sebelah timur Jambi sekarang. Sumatera merupakan Semenanjung Emas karena di daerah Bukit Barisan di sepanjang pantai barat Sumatera tidak kalah banyak emasnya dibandingkan Malaka (der Meulen, 1988:37).

Menurut Sartono (1984:10) pusat-pusat kerajaan sebelum Sriwijaya, kemungkinan besar terletak di tengah Pegunungan Bukit Barisan yang subur dan juga ditengah-tengah kawasan penghasil emas serta logam lain seperti tembaga dan timbal. Menurut Obdyen (1941) pada abad-abad pertama SM Pulau Sumatera terbagi menjadi dua

oleh Teluk Wen yang menjorok ke arah Bukit Barisan sejauh kurang lebih 200 km. Teluk ini memisahkan Yava Minor dari Yava Mayor. Yava Minor meliputi Tapanuli dan Aceh, sedangkan Yava Mayor adalah Jawa ditambah Sumatera Selatan, di Jambi hingga Muara Tebo (Sartono, 1984:11). Yawadwipa (labadiaou) yang disebut sebagai pulau emas dan perak, adalah sama dengan Yava Mayor. Emas dan perak dari Yawadwipa itu disalurkan ke kota-kota Argyree, Chryse, Zabag, dan Sarboza, yang semuanya pada masa itu terletak di Teluk Wen. Menurut Sartono letaknya di Sungai Tebo (Muara Tebo) dan Tembesi (Muara Tembesi) sekarang.

Di Bukit Barisan di sepanjang pantai barat Sumatera, merupakan daerah yang menyimpan kandungan emas, termasuk daerah Rejang-Lebong (Meulen, 1988:38). Banyak sisa-sisa tambang emas penduduk setempat ditemukan di sepanjang pegunungan Bukit Barisan, dimulai dari daerah Bengkulu di bagian selatan, melalui Minangkabau dan Tapanuli sampai ke Aceh di ujung barat pulau Sumatera (Sartono, 1984:1). Gunung Ophir di daerah Tapanuli Selatan di sebelah barat daerah Lubuk Sikaping, Sumatera Barat, merupakan nama gunung emas yang dihubungkan oleh orang-orang Portugis dengan kisah Raja Sulaiman yang mengirim ekspedisi ke Ofir untuk mencari emas, yang tertulis dalam Kitab perjanjian lama. Di sebelah timur Gunung Ophir, terdapat gunung lain, yaitu Gunung Amas, yang berarti Gunung Emas. Selain emas, di daerah itu ditemukan pula timbal (Pb), besi (Fe), belerang (S), nikel (Ni) dan oker (Sartono, 1984:2). Pada tahun 1511 Tome Pires mencatat bahwa di daerah Minangkabau terdapat pelabuhan ekspor emas, yaitu Pariaman, Tikus dan Pancur. Kegiatan penambangan emas di jaman kuno dilaporkan terdapat di daerah Sapat (Muara Labuh), sekitar 40 km sebelah tenggara Alahan Panjang di Sumatera bagian tengah. Di daerah itu terdapat banyak terdapat sisa-sisa pertambangan emas zaman kuno, sehingga disebut "kawasan dengan 1300 tambang emas" (Boomgaard, 1947 dalam Sartono, 1984:5).

Dari uraian di muka diketahui banyak tempat di Sumatera yang memiliki sumber emas. Apabila sejak awal Masehi, emas di Sumatera telah menjadi komoditi bernilai tinggi, selain perhiasan, bahan ramuan untuk wangi-wangian dan obat, besar kemungkinan pada masa Sriwijaya abad VII-XIII M, jenis komoditi tersebut telah menjadi sumber penghasilan negara yang terbesar dan terpenting. Kerajaan Sriwijaya tentunya telah menguasai jaringan produksi, distribusi dan konsumsi jenis-jenis komoditi yang bernilai tinggi di pasaran internasional itu. Menurut John N. Miksic (1984:20) jauh sebelum munculnya Kerajaan Sriwijaya, di Sumatera telah terbentuk jaringan komunikasi

dan kegiatan lalu lintas, tukar menukar informasi dan bahan dengan frekuensi tinggi, dan sudah berhasil mendorong manusia setempat menciptakan suatu pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Pola kebudayaan yang bersifat peradaban itu didukung oleh sejumlah besar penduduk yang tinggal di pusat-pusat kegiatan (kota, pelabuhan), memiliki diferensiasi produksi dan profesi, seperti pengrajin, saudagar, pegawai, pendeta, pejabat pemerintah; terdapatnya pemusatan kekuatan politik dan ekonomi yang efektif; telah digunakannya simbol-simbol atau tulisan-tulisan untuk merekam dan alih informasi; telah digunakan satuan pengukuran berat, pengukuran waktu dan ruang yang konvensional dan standard, dengan menggunakan perhitungan matematik dan kalender (Childe 1951 dalam Cottrel, 1955: 32).

### Prasasti-prasasti Sriwijaya

Prasasti-prasasti batu peninggalan Kerajaan Sriwijaya dari abad VII Masehi ditemukan di Palembang, Jambi, Lampung Selatan dan Pulau Bangka, bukti adanya peradaban tinggi pada masa itu di Sumatera. Prasasti-prasasti yang seluruhnya berjumlah 13 buah itu terdiri dari Prasasti Kedukan Bukit (605 C), Prasasti Kota Kapur (608 C), Palas Pasemah (abad VII M), Telaga Batu (abad VII M), Boom Baru (abad VII), Karang Brahi (abad VII M), Sabokingking (?), 3 buah prasasti pendek Telaga Batu (?), Talang Tuwo (606 C) dan prasasti Bukit Seguntang (Kartakusuma, 1993: 25)

Prasasti Kedukan Bukit memberikan informasi tentang awal berdirinya kerajaan Sriwijaya yang didirikan oleh Dapunta Hiyam, setelah melakukan perjalanan "siddhayatra" bersama 20.000 tentara dan dua ratus peti perbekalan, berangkat dari suatu tempat dan sampai di Mukha Upang. Di tempat itu ia mendirikan *wanua* Sriwijaya. Selanjutnya Sriwijaya tumbuh menjadi kedatuan yang besar dan kuat. Dari Prasasti Sabokingking, yang ditemukan di Telaga Batu, Palembang, tersirat struktur Kedatuan Sriwijaya pada akhir abad VII M. Kedatuan Sriwijaya merupakan sebuah *mandala* yang meliputi daerah pusat dan daerah bawahan dari hasil penaklukan. Daerah pusat terdiri dari *kedatuan* (keraton atau istana raja), yang dikelilingi pemukiman (*vanua*) yang juga sebagai lokasi berbagai aktivitas, baik tempat tinggal, tempat bangunan suci (*vihara*) dan pemiagaan. Para pedagang (*vaniyaga*) dan kapten bahari (*puhavam*) yang datang dari luar, melakukan pemiagaan di daerah *vanua*. Daerah pusat tersebut dikelilingi oleh *desa-des*a lain, dipimpin oleh datu. Desa-des

Desa-des

Desa-des

Desa-des

Desa-des

Desa-des

Desa-des

Desa-des

Desa-des

Desa-des

Bangka dan Lampung yang merupakan wilayah kekuasaan Sriwijaya pada masa itu, dikenal sebagai daerah sumber-sumber emas berada. Untuk melancarkan dan mengembangkan jalur distribusi emas, dilakukan penaklukan-penaklukan ke berbagai wilayah yang belum tunduk pada Sriwijaya. Pada masa itu pula Sriwijaya menaklukan Malayu di Jambi yang dianggap menjadi saingannya dalam menguasai emas di Sumatera. Ekspansi Sriwijaya ke Semenanjung Melayu pada abad VIII-XIII M, dapat dianggap ekspansi emas, karena di pegunungan yang berjajaran antara Kelantan dan Malaka; juga sungai-sungai yang bermata air di pegunungan tersebut, banyak didapatkan emas (der Meulen, 1988:37). Daerah semenanjung itu dikenal pula sebagai penghasil emas yang besar selain Sumatera.

Emas merupakan penunjang utama tiang ekonomi Sriwijaya, selain sumber pendapatan dari pajak pelabuhan dan jalur perniagaan yang telah dikuasai. Penguasaan mutlak atas emas oleh Sriwijaya, tersirat pada Berita Arab yang ditulis Abu Zayd pada tahun 916 Masehi, menyebutkan sebuah kerajaan yang bernama Zabag Rajanya mempunyai kebiasaan melemparkan segumpal emas ke dalam sebuah danau yang berhubungan dengan laut sehingga airnya payau di dekat istana setiap harinya (Rangkuti, 1989:163).

#### Tanah dan peradaban di Jawa

Sejak zaman purba Pulau Jawa telah menjadi lahan yang subur bagi tanaman padi. Menurut Clifford Geertz (1976) unsur-unsur api, udara, air dan tanah, merupakan kombinasi yang menguntungkan bagi mekarnya persawahan di Jawa, bahkan sejak sebelum Masehi. Unsur-unsur itu diperoleh dari puluhan gunung berapi yang masih aktif, sungai-sungai pendek yang deras, dataran tertutup yang melandai dengan drainasi yang baik, serta iklim yang agak lembab.

Menurut Clifford Geertz, sistem padi sawah yang integral dan efektif sudah dibuat untuk pertama kalinya di lembah-lembah sungai yang kecil di celah-celah gunung berapi, yang terdapat di bagian tengah dan bagian timur Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, daerah pertanian sawah mula-mula terdapat di dataran segiempat yang dibentuk oleh gunung-gunung berapi Sumbing, Sindoro, Merbabu dan Merapi; yaitu di sepanjang Sungai Progo yang mengalir ke selatan di daerah Magelang, di hulu Sungai Solo (Dengkeng) di sebelah barat daya Surakarta, di lembah Sungai Serayu di hulu Banyumas, dan dataran Sungai Lukolo dan Bogowonto di sekitar Kebumen dan Purworejo atau Kedu (Geertz, 1976:43). Di daerah-daerah ini pada sekitar abad VIII Masehi telah muncul peradaban yang ditopang oleh masyarakat agraris, yaitu kerajaan Mataram Kuna.

Pertanian sawah membutuhkan kualitas tanah yang sangat baik untuk penanaman padi, drainasi dan irigasi yang terus menerus dikontrol, proses penanaman yang harus memperhatikan pengairan di sawah yang sesuai dengan kondisi padi pada saat tanam, panen, penyiangan dan pemupukan, menyebabkan pertanian sawah dari segi teknis cenderung untuk menjadi rumit (Geertz, 1976:32-33). Pembangunan dan perawatan sistem pengontrolan air seperti pembuatan petak-petak sawah dan pematang, pembuatan parit-parit dan pintu air, waduk, saluran air, terowongan, sumur, membutuhkan proses waktu yang panjang dengan penyempurnaan sistem-sistem yang sudah ada secara terus menerus. Pengontrolan air merupakan jenis investasi "peralatan modal" yang tidak dikenal dalam jenis pertanian yang berpindah-pindah (Geertz, 1976). Hal ini membutuhkan jumlah penggarap yang lebih besar dan membutuhkan organisasi sosial yang lebih kompleks daripada masyarakat dengan mata pencaharian pertanian yang berpindah-pindah.

Dari sumber-sumber prasasti, diketahui *wanua* atau kompleks desa merupakan unit ekonomis dan politis terkecil di Jawa (Christie, 1989:4) yang terbentuk dari sistem pertanian yang sudah mantap. Suprastruktur negara di atas lapisan *wanua* terdiri dari dua jajaran: *keraton (rajya)* dan *watak*. *Watak* tumbuh dari penemuan seorang kepala pada masa lampau zaman pra-negara, yang telah beralih ke dalam negara yang lebih besar di Jawa pada abad VIII M. Pada masa Mataram Kuna, daerah *Watak* diperintah oleh para rakai atau rakryan, sebagai penguasa daerah yang mempunyai daerah otonom yang cukup luas dan mempunyai birokrasi sendiri. Pada umumnya mereka mempunyai hubungan keluarga dengan raja (*rajya*) atau kraton. Para rakai ini tidak dapat dianggap sebagai pegawai raja, karena kedudukan mereka bukan berdasarkan wewenang yang berasal dari raja, melainkan karena kedudukannya sebagai kepala daerah dalam kerajaan yang berdasarkan hukum adat (Titi Surti Nastiti, 1982a:9).

Dibandingkan dengan Sriwijaya, kerajaan Mataram Kuna lebih banyak meninggalkan prasasti dari batu dan logam, yang jumlahnya ratusan buah. Lebih dari 50 buah prasasti berasal dari masa pemerintahan Kayuwangi dan Watukura Dyah Balitung. Sebagian besar prasasti-prasasti peninggalan kedua raja Mataram Kuna itu --dan juga prasasti-prasasti Jawa Kuna lainnya-- memuat informasi tentang tanah dengan berbagai aspeknya, baik jenis tanah (sawah, ladang, kebun, *pagagan*, padang rumput, taman, pemukiman, hutan, rawa-rawa) dan permasalahan yang meliputi transaksi tanah, hak milik atas tanah, pajak tanah dan penetapan *sima*. Dari sumber-sumber tertulis tersebut, diketahui tanah bagi masyarakat Jawa Kuna memiliki nilai ekonomi yang

tinggi, selain memiliki nilai religio-magis dengan penduduk yang tinggal di atasnya (Boechari, 1977: 5). Selain itu masalah tanah erat berkaitan dengan masalah pendudukan.

Walaupun tanah merupakan sumber ekonomi yang penting bagi negara Mataram Kuna yang agraris, tetapi raja atau penguasa bukanlah pemilik tanah yang mutlak. Dalam beberapa prasasti, seperti prasasti Waharu I (795 C), prasasti Mami (800 C), prasasti Taragal (802 C), prasasti Kurunan atau Parhyanan (807 C), prasasti Pangumulan (825 C), dari masa Kayuwangi dan Watukura, serta prasasti Lintakan (842 C), prasasti Herin (859 S), prasasti harahara (888 C), dari masa pemerintahan Sindok, terdapat kasus dimana raja tidak dapat mengambil tanah yang disebutkan sebagai miliknya itu secara sewenang-wenang. Raja sekalipun jika memerlukan tanah untuk maksud tertentu, ia harus membeli tanah dari rakyatnya (Titi Surti Nastiti, 1982: 9). Transaksi-transaksi tanah dapat dilakukan oleh siapa saja, baik penduduk desa maupun para pejabat, mulai dari pejabat tinggi kerajaan yang bergelar rakai sampai pejabat desa yang bergelar *rama* (Titi Surti Nastiti, 1982: 9).

Rakyat tidak hanya memiliki hak pakai, karena dalam kenyataannya raja pada umumnya membiarkan masyarakatnya melangsungkan kehidupannya. Tanah sebagai sumber ekonomi raja diperoleh dalam bentuk pajak dan tenaga kerja untuk raja, merupakan hasil atau bagian yang diperoleh raja karena statusnya (Naerssen, 1970 dalam Titi Surti Nastiti, 1982b: 9).

Menurut Jan Wisseman Christie (1988: 12) keuangan negara tergantung dari perpajakan langsung dan tagihan atas tenaga kerja paksa di daerah-daerah terdekat dengan keraton. Dan di daerah lain, didapat dari berbagai bentuk pajak pertanian, berkisar dari pemberian pemungutan hak istimewa atas pajak teritorial hingga ke pembentukan kelas yang disebut *mangilala drawya haji*, kelompok pejabat kerajaan yang tidak mendapat daerah lungguh, sehingga hidupnya tergantung dari gaji yang diambil dari perbendaharaan kerajaan. Para pejabat kerajaan ini pada masa Mataram Kuna bertugas memungut pajak, seperti *patih*, *wahuta*, *nayaka*, *pratyaya*, *pangkur*, *tawan*, *tirip*, *rama* dan pejabat lainnya. Dalam benta dinasti Song disebutkan ada tiga orang putera raja membantu di dalam pemerintahan sebagai raja muda, dan ia dibantu oleh pejabat-pejabat dengan gelar *pamegat* dan empat orang rakryan yang bersama-sama mengurus soal-soal pemerintahan seperti para menteri di Cina. Mereka itu tidak mempunyai penghasilan yang tetap, tetapi sekali-sekali mereka mendapat hasil bumi dan hasil-hasil yang lain. Kemudian ada lebih dari 300 pejabat sipil yang bertugas mencatat penghasilan-penghasilan kerajaan. Masih ada lagi 1000

pegawai rendah yang mengurus benteng-benteng dan parit kota, perbendaharaan kerajaan dan lumbung-lumbung padi, dan para prajurit Panglima perang mendapat sepuluh tail emas tiap setengah tahun; ada 30.000 prajurit yang dibayar setengah tahun sekali sesuai dengan pangkat masing-masing (Boechari, 1977: 9).

Raja mempunyai kewajiban untuk menetapkan pajak atas seluruh tanah kerajaannya dan melindungi rakyatnya dari marabahaya. Besarnya pajak yang dipungut pada waktu itu, menurut berita Dinasti Song ialah 10 persen dari penghasilan tanah, sedangkan menurut Prasasti Palepangan (828 C), setiap *tampah* tanah dikenai pajak sebesar 6 *dharâna* perak (Titi Surti Nastiti, 1982a: 10).

Menurut Boechari (1980) ada 120 prasasti Jawa Kuna yang berisi tentang penetapan *sima*, daerah perdikan, sebagai anugerah raja kepada seorang pejabat yang telah berjasa kepada kerajaan atau sebagai anugerah raja untuk kepentingan sesuatu bangunan suci. Tanah yang dijadikan penetapan *sima* itu dibebaskan dari pemungut pajak kerajaan, dan selanjutnya berstatus swatantra yang dikuasai oleh *bhâtâra*. Dari segi religio magis peristiwa penetapan *sima* ini merupakan peristiwa yang sangat penting yang menyangkut perubahan status sebidang tanah, namun di sisi lain tampaknya kerajaan kehilangan sebagian penghasilannya karena tanah yang dijadikan *sima* itu dibebaskan dari pungutan pajak. Akan tetapi menurut Jan Wisseman Christie, banyaknya tanah yang dijadikan *sima* merupakan suatu cara untuk mengatasi kepadatan penduduk dan pengembangan wilayah persawahan dan permukiman. Sejumlah pemberian negara pemerintah *sima* tampaknya dilakukan dengan alasan jelas, supaya wilayah yang kurang penting menjadi lebih menarik bagi para petani, dan dengan demikian memperluas permukiman yang sudah mantap menjadi wilayah yang strategis. Anugerah raja ini sebagian besar diberikan di pinggir wilayah yang sudah mantap. Sumbangan tersebut yang dilakukan atas perintah rakai setempat, tetapi dengan persetujuan raja, pada sebagian besar kasus menyangkut *tgai* (tanah kering) atau *suket* (tanah belukar atau tanah kering yang tidak ditanami) yang akan diubah menjadi sawah (Christie, 1989: 6).

Daerah yang ditetapkan sebagai daerah perdikan itu, selanjut dikelola oleh sekelompok orang dari kalangan sipil yang dipimpin oleh *bhâtâra*. Pada kenyataannya mereka menarik denda-denda atas segala tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan orang-orang asing (*wargga kilalan*) yang tinggal di dalam lingkungan daerah *sima*. Selain itu juga mereka menarik pajak perdagangan (*masamwyawahara*) dan pajak usaha, yaitu menarik pajak-pajak dari rakyat petani, pedagang dan pengusaha. Adakalanya pajak usaha

itu harus dibagi tiga, sepertiga masuk kas kerajaan, sepertiga untuk mereka yang mengurus *sima* atau bangunan suci, dan yang sepertiga lagi dikuasai oleh *bhatara* di bangunan suci yang bersangkutan (Boechari, 1980:325).

## Penutup

Dari perbandingan isi prasasti masa Sriwijaya (abad VII M) dan prasasti Mataram Kuna (abad IX-X M), tampak ada perbedaan dalam cara penguasaan sumber-sumber ekonomi kedua kerajaan tersebut. Hampir sebagian besar dan prasasti Sriwijaya memuat kutukan kepada orang-orang yang mencoba berkhianat dan tidak setia kepada raja. Kutukan itu ditujukan kepada putra raja, para pemimpin, para komandan tentara, para *nayaka*, para *prataya*, para hakim, para pemimpin, pengamat para buruh, para pengamat kasta-kasta yang rendah, para pembuat pisau, para *kumarramatya*, para *catabhata*, para *adhikarana*, para juru tulis, para pemahat, para kapten bahari, para pedagang, para komandan, dan juga para tukang cuci istana. Sikap keras itu ditujukan untuk mencegahnya timbulnya pemberontakan-pemberontakan dalam upaya menggalang kekuatan di dalam untuk melancarkan usaha adaptasi eksternal. Sebagai negara maritim yang mengandalkan ekonomi komersial, ekonomi Sriwijaya dipengaruhi oleh situasi geopolitik dan ekonomi kawasan Asia Tenggara, yang pada masa itu didominasi oleh India dan Cina. Sriwijaya dan juga negara-negara lainnya di Asia Tenggara merupakan subordinan dari kepentingan geopolitik dan ekonomi dari India dan Cina (Rangkuti, 1989: 174). Pada masa itu emas merupakan komoditi bernilai tinggi, yang diminati oleh pasar internasional. Hal itu menyebabkan terjadi persaingan keras antara kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, maupun persaingan yang terjadi antara daerah-daerah bawahan dari satu kerajaan. Upaya raja Sriwijaya menaklukkan Melayu, serta menundukkan datu-datu yang mencoba memberontak kepadanya, adalah salah satu cara untuk menguasai sumber-sumber emas yang banyak terdapat di Sumatera. Sejarah mencatat bahwa kerajaan-kerajaan di Sumatera mengandalkan ekonominya dari perdagangan emas dan menguasai sumber-sumbernya. Menurut catatan yang berasal dari orang-orang Cina dari abad VIII Masehi, Sriwijaya terdiri dari dua kerajaan dengan pengaturan administrasi yang terpisah. Kerajaan yang di barat dinamakan *Lang-p'o-lu-ssu* (Barus) yang banyak menghasilkan emas, air raksa, kapur barus dan damar. Pada masa raja Adityawarman berkuasa di daerah Minangkabau pada abad XIV, ia menggelari dirinya sebagai "Penguasa Negeri Emas". Pada masa itu hasil perundagian emas dalam bentuk lemperangan emas, benang emas, lembaran emas bertulis, kalung, dan patung berlapis emas, yang

membuktikan bahwa logam emas memang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Sartono, 1984: 7).

Berbeda dengan cara di Jawa, raja Mataram Kuna mengelola sumber-sumber ekonominya dengan cara pendelegasian kepada para pejabat di keraton, di *watak* (wilayah kekuasaan rakryan), dan *wanua* (desa). Penghasilan negara berupa pajak tanah dan pajak usaha lainnya, tidak terpusat dan tidak pula disistematiskan secara khusus (Christie, 1989:12). Hal ini memungkinkan seluruh penghasilan dari pajak yang menjadi bagian dari kerajaan, tidak tersalur secara utuh, karena setiap pejabat diberi kuasa untuk memungut pajak tertentu dari sejumlah orang atau desa tertentu, memungkinkan para pejabat itu mencukupi diri sendiri. Pada tingkat *watak*, penguasa di sana juga memiliki otonomi mengelola sumber-sumber ekonominya tanpa pengawasan langsung dari kerajaan, menyebabkan secara potensial dapat bersaing dengan keraton. Pada abad VIII ada organisasi politik di Mataram Kuna mempunyai kecenderungan yang kuat untuk menjauhkan diri dari pusat (*centrifugal tendency*) dan sifatnya memecah (Christie, 1989:13).

## Ucapan terima kasih :

Karena terbatasnya waktu, tulisan ini tak mungkin dapat saya selesaikan sendiri. Bantuan dari rekan-rekan yang tulus dan antusias, datang dari Richadiana Kartakusuma yang banyak memberikan bahan dan masukan tentang "lautan data" yang belum pernah saya arungi sebelumnya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Titi Surti Nastiti dan Yusmaeni Eriawati yang telah mengumpulkan "tanah dan emas" untuk melengkapi tulisan ini. Selanjutnya, seluruh isi tulisan ini adalah tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Jakarta 21 Maret 1994

## KEPUSTAKAAN

- Boechari, 1977. *Epigrafi dan Sejarah Indonesia*, dalam *Majalah Arkeologi* Th I No: 2 November 1977. Jakarta: Fakultas Sastra UI
- , 1980, *Candi dan Lingkungannya* dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi*, Cibulan, 21-25 Februari 1977 Jakarta Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Christie, Jan Wisseman, 1989, *Raja dan Rupa Negara Klasik Awal di Jawa* dalam *Pusat, Simbol, dan Hirarki Kekuasaan* Jakarta Yayasan Obor Indonesia
- Coedes, G dan L-Ch. Damais, 1989, *Kedatuan Sriwijaya Penelitian tentang Sriwijaya* Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Cottrell, Fred, 1955, **Energy and Society The Relation Between Energy Social Change, And Economic Development** New York Toronto London: McGraw-Hill Book Company, Inc.

Geertz, Clifford, 1974, **Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia**. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Kartakusuma, Richadiana, 1993, *Dapunta Hiyam Sri Jayanasa: Kajian atas makna dari prasasti Telaga Batu* dalam **Amerta No:13** Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

van der Meulen, WJ, 1988, **Indonesia di ambang Sejarah**. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Miksic, John N, 1984, *Penganalisaan Wilayah dan pertumbuhan Kebudayaan Tinggi di Sumatera Selatan*, dalam **Berkala Arkeologi V(I)** Maret 1984 Yogyakarta: Balai Arkeologi .

Rangkuti, Nurhadi, 1989, *Struktur Kota Sriwijaya di Daerah Palembang*, dalam **Pertemuan Ilmiah Arkeologi V**, Yogyakarta 4-7 Juli 1989. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.

Rita Fitriati, 1990, *Pasak-pasak dari Masa Balitung dan Sindok* (hal 102-124) dalam **Monumen Karya Persembahan untuk Prof. Dr. R. Soekmono** Depok: Lembaran Sastra FS-UI.

Sartono, 1984, *Emas di Sumatera Kala Purba* dalam **AMERTA No. 8** Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Sumadio, Bambang (editor), 1984, **Sejarah Nasional Indonesia II**. Jakarta: Balai Pustaka.

Titu Surti Nastiti, dkk, 1982, **Tiga Prasasti dari Masa Balitung**. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Titu Surti Nastiti, 1982a, *Hak Milik Atas Tanah*, dalam **MISI Jilid XI No.01** Juni 1982. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

-----, 1982 b , *Masalah Hak Milik Atas Tanah Abad 9 Dan 10 Masehi* dalam **AMERTA**. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.